



# Fraksi di Parlemen Berharap Pemkab Kapuas Hulu Raih WTP Tahun Depan

Putussibau-RK. Mayoritas Fraksi-fraksi di DPRD Kapuas Hulu berharap dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan, Pemkab Kapuas Hulu mampu meraih opini 'Wajar Tanpa Pengecualian' (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalbar. Hal itu disampaikan saat paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013, Jumat (22/8) di ruang rapat DPRD setempat.

Keenam fraksi di DPRD Kapuas Hulu dapat menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 untuk dijadikan Perda. Sidang paripurna itu dipimpin Ketua Ade M Zulkifli SAP, didampingi Wakil Ketua M Yusuf Habibi SSos serta dihadiri sebagian besar anggota. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Bupati AM Nasir SH, Wakil Bupati Agus Mulyana SH MH, kepala

SKPD dan perwakilan instansi vertikal di Kapuas Hulu. Fraksi PPP melalui juru bicarannya, Drs Joni Kamiso mengatakan dapat menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013, dan meminta untuk segera ditetapkan menjadi Perda.

Fraksi Bintang Keadilan melalui juru bicarannya Baco Mawati SE mengingatkan dalam pengelolaan keuangan 2013, Kapuas Hulu hanya memperoleh WDP. Diharapkan ke depan bisa meraih WTP. "Untuk itu pengelolaan keuangan harus dikelola secara akuntabel, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Baco.

Hal yang sama disampaikan Fraksi Golkar melalui juru bicarannya Janwar yang mengharapkan ke depan Pemkab Kapuas Hulu dapat meningkatkan kinerja dalam pen-



Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir menandatangani tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 lewat paripurna di ruang rapat DPRD Kapuas Hulu, Jumat (22/8). -Aman-Hairadi

gelolaan keuangan sehingga memperoleh opini WTP.

Begitu pula dengan Fraksi Perjuangan Daerah lewat juru bicarannya Kartini yang meminta pemerintah daerah agar terus meningkatkan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparansi.

"Sehingga dari WDP dapat ditingkatkan menjadi WTP," ujar Kartini.

Sementara Fraksi PDJP melalui juru bicara Robertus SH memberikan saran kepada pimpinan pemerintah daerah agar memperhatikan SKPD-SKPD yang penyerapan angg-

arannya kurang. Kepada SKPD tersebut agar ditinjau kembali, sehingga dipindahkan kepada SKPD yang kinerjanya baik.

Sedangkan Fraksi Demokrat melalui juru bicarannya Hamdi Jafar SSos menyarankan pemerintah daerah membentuk Panitia untuk menginventarisir aset. Pasalnya, masalah aset inilah yang mengakibatkan Kapuas Hulu belum bisa meraih WTP. "Kalau masalah aset bisa dipecahkan, kami yakin kita bisa meraih WTP," tegas Hamdi. Pada kesempatan itu, Bupati Kapuas Hulu AM Nasir mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari fraksi-fraksi. Saran dan masukan ini tentu bertujuan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik, demi kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu.

Laporan: Arman Hairadi  
Editor: Julianus Ratno